

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap prosedur pengelolaan keuangan di Polda DIY, dapat disimpulkan bahwa implementasi setiap tahapan siklus keuangan—mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pengawasan—telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip good governance. Penggunaan aplikasi SAKTI menjadi langkah maju dalam mewujudkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan.

Meskipun demikian, beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan revisi anggaran, dan minimnya keterbukaan laporan kepada publik masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Untuk itu, perlu adanya penguatan kapasitas personel, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan keterlibatan publik dalam mengawasi penggunaan anggaran sebagai bagian dari akuntabilitas kolektif.

Secara keseluruhan, prosedur pengelolaan keuangan di Polda DIY telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik. Dengan peningkatan berkelanjutan dan inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan semakin meningkat.

5.2 Pengetahuan dan Wawasan Baru

Melalui pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir ini, penulis memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan baru, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan sektor publik di lingkungan instansi pemerintahan, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Salah satu hal yang menjadi wawasan penting adalah pemahaman mendalam mengenai siklus pengelolaan keuangan negara yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan dan evaluasi. Pengetahuan ini memperkuat pemahaman penulis mengenai bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat diterapkan dalam praktik birokrasi yang kompleks.

Selain itu, penulis juga memahami bahwa penerapan sistem dan aplikasi keuangan seperti SAKTI, SIPERKAB, dan aplikasi e-budgeting lainnya, sangat berperan penting dalam mendukung efisiensi serta integritas proses keuangan di satuan kerja. Wawasan ini tidak hanya memperkaya kompetensi teknis dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga membuka pemahaman baru tentang pentingnya literasi digital dalam sistem tata kelola keuangan modern.

Tugas akhir ini juga memberikan pembelajaran bahwa prosedur keuangan tidak semata-mata administratif, tetapi memiliki dimensi strategis dalam mendukung keberhasilan program kerja dan pelayanan publik. Interaksi langsung dengan proses penyusunan anggaran di Polda DIY membuka pandangan bahwa tata kelola keuangan yang baik memerlukan kolaborasi lintas bidang, komitmen pimpinan, serta integritas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Terakhir, penulis memperoleh wawasan tentang pentingnya dokumentasi yang rapi dan pelaporan yang transparan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan prinsip good governance yang terus didorong oleh pemerintah.